

**EVALUASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON
TUNAI (BPNT) BERBASIS ELEKTRONIK DALAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN MASYARAKAT
DI KECAMATAN TERBANGGI BESAR
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



Oleh :

ALMIRA YUNISA FITRIA

NIM. 07011181924011

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
JULI 2023**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**EVALUASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON
TUNAI (BPNT) BERBASIS ELEKTRONIK DALAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN MASYARAKAT
DI KECAMATAN TERBANGGI BESAR
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1

Ilmu Administrasi Publik

Oleh :

ALMIRA YUNISA FITRIA

NIM. 07011181924011

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, 5 Juli 2023

Pembimbing

Ermanovida, S.Sos., M.Si

NIP. 196911191998032001



Mengetahui,
Ketua Jurusan



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA

NIP. 196911101994011001

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**EVALUASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON
TUNAI (BPNT) BERBASIS ELEKTRONIK DALAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN MASYARAKAT
DI KECAMATAN TERBANGGI BESAR
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

SKRIPSI

Oleh :

**ALMIRA YUNISA FITRIA
07011181924011**

**Telah Dipertahankan di Depan Penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada Tanggal 20 Juli 2023**

Pembimbing :

1. Ermanovida, S.Sos., M.Si
NIP. 196911191998032001



Penguji :

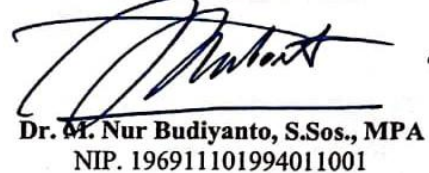
1. Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001
2. Junaidi, S.IP., M.Si
NIP. 197603092008011009



Mengetahui,



Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Publik



**Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

(Q.S. Al-Insyirah : 5)

“Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang.”

(Q.S. Ar-Ra'd : 28)

Dengan izin Allah SWT,

Saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua saya tercinta,
Mama Yuniar dan Papa Sapri
2. Teruntuk orang-orang yang saya
sayangi
3. Teman-teman seperjuangan Ilmu
Administrasi Publik 2019
4. Almamater kebanggaan, Universitas
Sriwijaya

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Almira Yunisa Fitria

NIM : 07011181924011

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul "Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Berbasis Elektronik Dalam Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat di Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah" ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Yang membuat pernyataan

Indralaya, Juli 2023



Almira Yunisa Fitria

NIM. 07011181924011

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Berbasis Elektronik Dalam Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat di Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S-1) pada jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini telah banyak memperoleh bantuan, bimbingan, serta arahan dari berbagai pihak yang terlibat. Maka dari itu, dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua Orang Tua tercinta yang senantiasa memberikan kasih sayang, motivasi, nasihat, doa serta dukungannya kepada penulis selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
4. Bapak Januar Eko Aryansyah, S.IP., SH., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
5. Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi.
6. Ibu Dr. Lili Erina, M. Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses perkuliahan.
7. Seluruh Dosen, Staf Tata Usaha, dan Karyawan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Ari Nugraha Mukti, S. STP., MM selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah, terima kasih atas izin yang diberikan sehingga penulis dapat melakukan penelitian.
9. Bapak Ahmad Fahrudin, S.Sos., MM selaku Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial DINSOS Kabupaten Lampung Tengah, terimakasih atas waktu dan informasi yang diberikan kepada penulis.
10. Bapak Chairul Tamimi, S. Kom selaku Koordinator Daerah Program BPNT yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan sehari-hari untuk memberikan informasi kepada penulis.
11. Bapak Rezky Sanjaya selaku TKSK Kecamatan Terbanggi Besar yang telah bersedia memberikan informasi kepada penulis.
12. Seluruh Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah.
13. Agen E-Warong di Kecamatan Terbanggi Besar yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bantuan dan informasi kepada penulis.
14. Masyarakat KPM BPNT di Kecamatan Terbanggi Besar yang telah bersedia untuk memberikan informasi kepada penulis selama proses penelitian berlangsung.

15. Daniel Baskara Putra, melalui karya-karyanya yang telah menjadi *moodbooster* bagi penulis selama penyusunan skripsi ini.
16. Puaghei ikam, Silpia Reza Meilani yang telah banyak memberikan dukungan, masukan, dan saran kepada penulis selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
17. Seluruh pihak yang telah terlibat secara langsung maupun tidak langsung dan memberikan bantuan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini berlangsung.
18. Teman-teman seperjuangan Ilmu Administrasi Publik 2019, semoga kita dapat meraih kesuksesan masing-masing di masa yang akan datang.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan menambah wawasan serta pengetahuan bersama. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan demi tercapainya kesempurnaan penulisan di masa mendatang.

Indralaya, Juli 2023

Almira Yunisa Fitria

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Berbasis Elektronik Dalam Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat di Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana keberhasilan pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam upaya penanggulangan kemiskinan masyarakat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan dalam pelaksanaan Program BPNT seperti belum meratanya pemberian bantuan bagi keluarga miskin dan adanya hambatan berupa saldo kosong pada Kartu Keluarga Sejahtera milik KPM. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan teori evaluasi dari William Dunn yang memiliki enam kriteria yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) secara umum telah terlaksana dengan cukup baik namun belum optimal. Hal ini terlihat dimana dengan diberikannya bantuan pangan ini cukup efektif dalam meringankan beban masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka sehari-hari. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala seperti adanya ketidakpastian jadwal penyaluran bantuan kepada KPM, pendistribusian yang belum merata, dan kualitas bahan pangan yang diberikan masih kurang baik. Hasil penelitian ini menyarankan beberapa perbaikan yang perlu dilakukan oleh pihak pelaksana seperti lebih disiplin dalam memastikan jadwal penyaluran bantuan, hendaknya pihak Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah secara rutin melakukan pembaharuan maupun perbaikan data KPM pada sistem DTKS, serta melakukan pengawasan secara langsung terkait kualitas bahan pangan yang dijual pada agen elektronik warong (e-warong).

Kata kunci : Evaluasi Program, Bantuan Pangan Non Tunai, Kemiskinan

Pembimbing

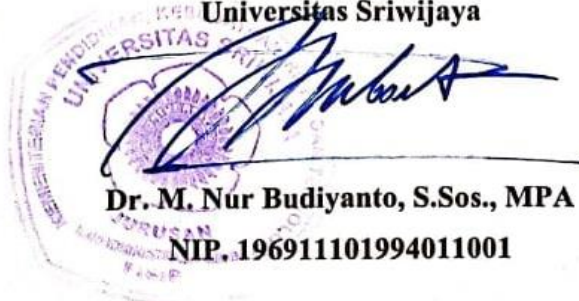
Ermanovida, S. Sos., M. Si

NIP. 196911191998032001



Indralaya, Juli 2023

**Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya**



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA

NIP. 196911101994011001

ABSTRACT

This research is entitled "Evaluation of the Electronic-Based Non-Cash Food Assistance (BPNT) Program in Community Poverty Alleviation in Terbanggi Besar District, Central Lampung Regency". The purpose of this research is to identify the success of the implementation of Non-Cash Food Assistance (BPNT) Program to alleviate community poverty. The research background is triggered by issues in the implementation of BPNT Program, including uneven distribution of assistance for poor families and problems in the form of zero balance in Card for Family Welfare (KKS) of KPM. It is a descriptive-qualitative research using data collection techniques of interview, observation, and documentation. The informants were determined using purposive sampling technique. This research used the theory of evaluation proposed by William Dunn which has six criteria of effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. The result of this research showed that in general, Non-Cash Food Assistance (BPNT) Program was implemented quite well but it had not been carried out optimally. It was seen from the effective distribution of food assistance to reduce poor families' burden in order to meet their daily food needs. However, there were problems in its implementation, including uncertain scheduling regarding the distribution of assistance to KPM, uneven distribution, and low quality of food. Based on these findings, this research suggests the implementing officials to make improvements, for instance to be more discipline in ensuring the schedule of distribution of assistance. In addition, Social Office of Central Lampung Regency should periodically improve and update KPM data on DTKS system, as well as conduct direct supervision on the quality of food sold by electronic warung (e-warong) agencies.

Keywords: Program Evaluation, Non-Cash Food Assistance, Poverty

Advisor

Ermanovida, S. Sos., M. Si

NIP. 196911191998032001

Indralaya, July 2023
Head of Public Administration Department
Faculty of Social and Political Sciences
Sriwijaya University

Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA

NIP. 196911101994011001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	14
1.3. Tujuan Penelitian.....	14
1.4. Manfaat Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1. Landasan Teori	16
2.2. Kebijakan Publik	16
2.2.1. Pengertian Kebijakan Publik.....	16
2.2.2. Tahap-Tahap Kebijakan Publik.....	17
2.3. Evaluasi Kebijakan.....	19
2.3.1. Pengertian Evaluasi Kebijakan	20
2.3.2. Tujuan Evaluasi Kebijakan	21
2.3.3. Model-Model Evaluasi Kebijakan	22
2.4. Program Bantuan Pangan Non Tunai	29
2.4.1. Pengertian Program Bantuan Pangan Non Tunai.....	29
2.4.2. Tujuan dan Manfaat Program Bantuan Pangan Non Tunai	30
2.4.3. Mekanisme Pemanfaatan Dana Bantuan Pangan Non Tunai.....	31
2.5. Kemiskinan.....	32
2.5.1. Pengertian Kemiskinan	32

2.5.2.	Indikator Kemiskinan.....	32
2.5.3.	Pendekatan dalam Kemiskinan	33
2.5.4.	Penanggulangan Kemiskinan.....	34
2.6.	Teori Yang Digunakan Dalam Penelitian.....	35
2.7.	Penelitian Terdahulu.....	35
2.8.	Kerangka Pemikiran	42
BAB III METODE PENELITIAN		44
3.1.	Jenis Penelitian	44
3.2.	Definisi Konsep	44
3.3.	Fokus Penelitian	45
3.4.	Jenis dan Sumber Data	47
3.4.1.	Jenis Data	47
3.4.2.	Sumber Data.....	47
3.5.	Informan Penelitian	48
3.6.	Teknik Pengumpulan Data	48
3.7.	Teknik Analisis Data	50
3.8.	Teknik Keabsahan Data.....	51
3.9.	Sistematika Penulisan.....	51
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		53
4.1.	Deskripsi Wilayah Penelitian	53
4.2.	Informan Penelitian	59
4.3.	Hasil Penelitian.....	60
4.3.1.	Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Berbasis Elektronik Dalam Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat di Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.....	60
A.	Efektivitas	61
B.	Efisiensi	66
C.	Kecukupan	78
D.	Perataan.....	83
E.	Responsivitas	93
F.	Ketepatan	95
4.4.	Pembahasan	110
BAB V PENUTUP		117
5.1.	Kesimpulan.....	117
5.2.	Saran	119

DAFTAR PUSTAKA	121
LAMPIRAN-LAMPIRAN	124

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Lampung Periode Tahun 2019-2021	8
Tabel 2. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018-2021	9
Tabel 3. Daftar Penerima BPNT di Kecamatan Terbanggi Besar Tahun 2022	10
Tabel 4. Jumlah KKS Saldo Kosong Pada Penyaluran BPNT Periode Agustus Tahun 2022.....	11
Tabel 5. Penelitian Terdahulu	36
Tabel 6. Fokus Penelitian.....	46
Tabel 7. Jumlah Desa/ Kelurahan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah.....	54
Tabel 8. Desa/ Kelurahan, Luas Wilayah, dan Jumlah Dusun/Lingkungan di Kecamatan Terbanggi Besar	57
Tabel 9. Jumlah Penduduk di Kecamatan Terbanggi Besar Tahun 2021-2022.....	59
Tabel 10. Informan Penelitian.....	59
Tabel 11. Sumber Daya Manusia Pada Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Terbanggi Besar.....	68
Tabel 12. Daftar Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Terbanggi Besar Tahun 2022	85
Tabel 13. Jumlah KKS Dengan Saldo Kosong Pada Penyaluran BPNT di Kecamatan Terbanggi Besar Periode Agustus 2022.....	89
Tabel 14. Jenis Bahan Pangan Dalam Penyaluran BPNT di Kecamatan Terbanggi Besar.....	98
Tabel 15. Matriks Hasil Temuan dan Pembahasan Penelitian.....	106

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. <i>Sustainable Development Goals</i>	2
Gambar 2. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2011-20223	
Gambar 3. Tahap Kebijakan Publik Menurut Dunn	18
Gambar 4. Model Evaluasi Kebijakan Leo Agustino	27
Gambar 5. Kerangka Pemikiran.....	43
Gambar 6. Peta Administratif Kabupaten Lampung Tengah.....	54
Gambar 7. Peta Administratif Kecamatan Terbanggi Besar.....	57
Gambar 8. Penyerahan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Terbanggi Besar	63
Gambar 9. Dokumentasi Bab VI Permensos Nomor 5 Tahun 2021	71
Gambar 10. Rapat Koordinasi Program BPNT Tingkat Kabupaten dengan Pendamping Program BPNT Kecamatan.....	72
Gambar 11. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).....	76
Gambar 12. Dokumentasi bersama KPM di Kelurahan Yukum Jaya.....	77
Gambar 13. Dokumentasi Bersama KPM di Desa Karang Endah.....	79
Gambar 14. Pembelian Bahan Pangan Oleh KPM di E-Warong	80
Gambar 15. Dokumentasi Pada Pasal 5 Permensos Nomor 3 Tahun 2021	84
Gambar 16. Terkait Pembukaan Akun Rekening Bagi KPM BPNT Baru	87
Gambar 17. Mesin <i>Electronic Data Capture</i> (EDC)	92
Gambar 18. Dokumentasi Permensos Nomor 5 Tahun 2021.....	97
Gambar 19. Buku Pedoman Umum Program Sembako.....	98
Gambar 20. Ketersediaan Bahan Pangan Sembako	99
Gambar 21. Dokumentasi Wawancara Bersama TKSK Kecamatan Terbanggi Besar	100
Gambar 22. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 262/HUK/2022	104
Gambar 23. Terkait Proses Verifikasi dan Validasi secara langsung kepada KPM BPNT di Kecamatan Terbanggi Besar.....	104
Gambar 24. Kondisi Rumah KPM BPNT di Desa Karang Endah dan Kelurahan Yukum Jaya.....	105

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas Pembimbing Skripsi	125
Lampiran 2. Surat Izin Penelitian.....	126
Lampiran 3. Kartu Bimbingan Skripsi	127
Lampiran 4. Lembar Perbaikan Seminar Proposal Skripsi	129
Lampiran 5. Surat Keterangan Pengecekan Similarity	130
Lampiran 6. Hasil Tes Plagiasi	131
Lampiran 7. Pedoman Wawancara	132
Lampiran 8. Pedoman Observasi	137
Lampiran 9. Pedoman Dokumentasi	138
Lampiran 10. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017.....	139
Lampiran 11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021	140
Lampiran 12. Permensos Nomor 3 Tahun 2021	146
Lampiran 13. Dokumentasi Penelitian	147

DAFTAR SINGKATAN

BPNT	: Bantuan Pangan Non Tunai
BPS	: Badan Pusat Statistik
CCT	: Conditional Cash Transfer
Dinsos	: Dinas Sosial
DTKS	: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
EDC	: Elektronik Data Capture
E- Warong	: Elektronik Warung Gotong Royong
GFSI	: Global Food Security Index
Kabid	: Kepala Bidang
Koorda	: Koordinator Daerah
KPM	: Keluarga Penerima Manfaat
KKS	: Kartu Keluarga Sejahtera
Linjamsos	: Perlindungan dan Jaminan Sosial
SDGs	: Sustainable Development Goals
SDM	: Sumber Daya Manusia
SIKS-NG	: Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial <i>Next Generation</i>
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
Permensos	: Peraturan Menteri Sosial
TKSK	: Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
UCT	: Unconditional Cash Transfer

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan dewasa ini masih menjadi permasalahan penting yang perlu mendapatkan perhatian secara seksama dalam penanganannya. Fenomena mengenai kemiskinan sendiri termasuk ke dalam salah satu isu global yang terjadi di berbagai negara. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahkan telah berkomitmen dalam upaya pengentasan kemiskinan bagi seluruh penduduk di dunia dengan dideklarasikannya kesepakatan pembangunan global melalui agenda pembangunan secara berkelanjutan yang disebut *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan kelanjutan dari agenda pembangunan sebelumnya yaitu Millenium Development Goals (MDGs). Adapun SDGs memuat 17 tujuan global dengan 169 target yang hendak dicapai guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari sisi sosial, ekonomi, maupun lingkungan secara berkelanjutan yang pelaksanaannya berlangsung dari tahun 2015 sampai tahun 2030 mendatang. Adanya agenda pembangunan secara berkelanjutan diharapkan dapat membantu generasi masa kini dalam memenuhi kebutuhan mereka, tanpa mengurangi kesempatan dari generasi berikutnya dalam pemenuhan kebutuhan di masa mendatang.

Pengentasan kemiskinan menjadi poin pertama sebagai fokus prioritas dalam agenda *Sustainable Development Goals* yang dinyatakan dengan “*No Poverty*” yang berarti “tanpa kemiskinan”. Dengan demikian, pengentasan

kemiskinan menjadi suatu agenda wajib yang harus dilakukan oleh seluruh pihak sehingga tercapainya tatanan masyarakat dunia yang sejahtera. Tujuan pengentasan kemiskinan yang terdapat pada poin pertama dalam SDGs, pada hakikatnya adalah tujuan akhir dari keseluruhan *goals* yang ada. Namun demikian, juga merupakan suatu syarat penentu agar kegiatan pembangunan berkelanjutan dapat dilaksanakan dengan maksimal (Alisjahbana dan Endah, 2018).

Gambar 1. Sustainable Development Goals



Sumber : bappenas.go.id

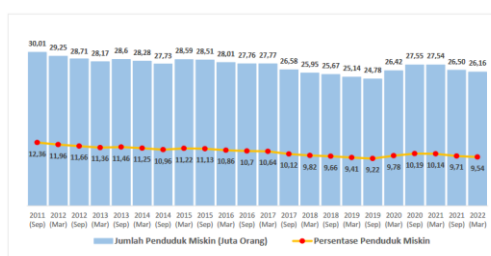
Pelaksanaan dalam rangka mencapai *Sustainable Development Goals* di Indonesia tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Perpres tersebut mengamanatkan bahwa dalam usaha mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan perlu adanya komitmen dan sinergi dari semua pihak guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut.

Permasalahan kemiskinan masih menjadi permasalahan penting di Indonesia. Angka kemiskinan penduduk di Indonesia masih terbilang cukup tinggi. Realita yang terjadi, dewasa ini masih banyak penduduk Indonesia yang hidup pada garis kemiskinan. Menurut Suparlan (dalam Noviyanti et al., 2019:60) mendefinisikan kemiskinan sebagai situasi di mana sejumlah orang memiliki

tingkat standar hidup yang rendah, rendahnya tingkat standar hidup ini kemudian berdampak pada kondisi moral, kesehatan, serta harga diri individu yang termasuk ke dalam golongan orang miskin. Kemiskinan menjadi sebuah ancaman yang menyebabkan ketidakmampuan individu untuk mencukupi kebutuhan dasar mereka. Selain itu, akibat kemiskinan tak jarang pula menyebabkan akses yang dimiliki masyarakat terhadap berbagai fasilitas pelayanan dasar yang disediakan oleh pemerintah menjadi terbatas, seperti akses pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan (Fatimah et al., 2022). Maka dari itu, perlu adanya suatu langkah khusus yang diambil oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka penanggulangan kemiskinan masyarakat.

Dilansir dalam Berita Resmi Statistik Nomor 51/07/Th./XXV.15 Juli 2022 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat secara keseluruhan terdapat sekitar 26, 16 juta orang di Indonesia yang tergolong sebagai penduduk miskin pada periode Maret Tahun 2022 atau sekitar 9,54 % dari jumlah total penduduk Indonesia.

Gambar 2. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2011-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Dapat dilihat pada data di atas menunjukkan bahwa angka kemiskinan Indonesia di bulan Maret tahun 2022 mengalami penurunan terhadap periode September 2021 di mana sebelumnya angka kemiskinan mencapai 26,50 juta jiwa,

yang artinya penduduk miskin di Indonesia telah berkurang sebanyak 0,34 juta jiwa atau sekitar 0,17%. Kemudian, tingkat kemiskinan pada periode Maret 2022 juga berkurang dibandingkan dengan periode Maret 2021 yaitu mengalami penurunan sebesar 0,60 % atau setara dengan 1,38 juta jiwa.

Permasalahan kemiskinan penduduk di Indonesia tidak terlepas dari fenomena kerentanan pangan yang dihadapi oleh penduduk miskin. Terlebih lagi dengan situasi perekonomian yang kini belum pulih akibat melandanya pandemi covid-19. Berdasarkan data yang dirilis oleh *Global Food Security Index (GFSI)*, mencatat pada tahun 2021 skor ketahanan pangan Indonesia mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 yaitu dari 61,4 menjadi 59,2 poin. Namun, pada tahun 2022 tingkat ketahanan pangan Indonesia kembali mengalami peningkatan sebesar 1,7 % dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 60,2 poin. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kondisi ketahanan pangan dan tingkat kemiskinan memiliki hubungan yang signifikan (Krisnamurti et al., 2010). Melalui perbaikan ketahanan pangan diharapkan turut berdampak pada berkurangnya tingkat kemiskinan masyarakat.

Pemerintah sebagai penyelenggara negara tentunya berkewajiban untuk menjamin tercapainya kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Berbagai macam usaha dilakukan Pemerintah Indonesia untuk mengatasi kemiskinan. Upaya tersebut sejalan dengan yang disebutkan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Dalam perundang-undangan disebutkan bahwa negara memiliki tanggung jawab dalam memelihara fakir miskin dengan memenuhi hak-hak dasar sehingga dapat menyejahterakan fakir miskin. Namun demikian, realita yang terjadi masih dijumpai banyak penduduk

yang hidup pada garis kemiskinan. Hal ini lantas menjadi suatu tantangan tersendiri bagi pemerintah guna mengatasi permasalahan kemiskinan di Indonesia. Apalagi Pemerintah Indonesia juga telah menargetkan angka kemiskinan ekstrem “nol persen” yang ingin dicapai pada tahun 2024 mendatang (kompas.com, 2022).

Dalam rangka menanggulangi kemiskinan penduduk, pemerintah menerapkan berbagai kebijakan dan program nasional sebagai bentuk perlindungan sosial terhadap masyarakat yang berada pada kondisi prasejahtera. Program merupakan sebuah realisasi dari suatu kebijakan yang diimplementasikan dalam jangka waktu tertentu dengan melibatkan sekelompok orang (Arikunto & Jabar, 2018). Adapun program yang berkaitan dengan perlindungan sosial kepada masyarakat miskin umumnya terbagi ke dalam dua jenis yaitu *Conditional Cash Transfer* (CCT) dan *Unconditional Cash Transfer* (UCT) (Khomaini, 2020). Perbedaan mendasar antara kedua jenis bantuan sosial ini terletak pada persyaratan untuk menerima bantuan tersebut. Pada CCT atau Bantuan Tunai Bersyarat, untuk mendapatkan bantuan sosial masyarakat wajib memenuhi beberapa syarat yang ditetapkan pemerintah, termasuk mengenai bagaimana penggunaan dana bansos tersebut. Sedangkan untuk bantuan jenis *unconditional cash transfer*, pemerintah memberikan bantuan sosial kepada penerima manfaat tanpa adanya ketentuan terkait bagaimana bantuan tersebut seharusnya digunakan.

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan program bantuan yang berasal dari Kementerian Sosial dan termasuk ke dalam jenis *Conditional Cash Transfer*. Sejak dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017,

sesuai dengan arahan Presiden terjadi perubahan di mana penyaluran bansos akan dilakukan dengan mekanisme non tunai kepada penerima bantuan. Perubahan sistem penyaluran bantuan sosial ini ditujukan untuk meningkatkan ketepatan sasaran dan menghindari adanya penyelewengan dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Ketepatan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat dapat dilihat dari tercapainya indikator 6 T yaitu (1) tepat sasaran, (2) tepat waktu, (3) tepat jumlah, (4) tepat kualitas, (5) tepat harga, dan (6) tepat administrasi.

Pelaksanaan BPNT diatur dalam Peraturan Menteri Sosial (PERMENSOS) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Program Sembako. Selain untuk menanggulangi kemiskinan, adanya BPNT juga ditujukan untuk meningkatkan ketahanan pangan bagi masyarakat prasejahtera. BPNT ditargetkan kepada masyarakat miskin yang memiliki kondisi perekonomian terendah yaitu di bawah 25 % yang berada pada lokasi pelaksanaan program (TNP2K, 2017). Dengan adanya BPNT ini diharapkan dapat meringankan beban keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Penyaluran BPNT diberikan kepada masyarakat miskin sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdata pada sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). DTKS ialah data elektronik yang terintegrasi berisikan informasi rujukan awal guna menentukan penerima bantuan sosial dalam program Kemensos RI (Ruhyana dan Ferdiansyah, 2020). Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial tersebut yang nantinya akan menentukan apakah masyarakat berhak untuk menerima program bantuan sosial dari pemerintah.

Adapun dalam pemberian BPNT ini menggunakan mekanisme akun elektronik, di mana setiap KPM akan dibuatkan rekening BPNT dan memperoleh

Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). KKS selanjutnya berguna sebagai *electronic wallet*. Melalui Kartu Keluarga Sejahtera tersebut setiap KPM akan memperoleh bantuan dari pemerintah berupa saldo uang elektronik sebesar Rp 200.000 /bulan yang penyalurannya dilakukan melalui Bank Himpunan Milik Negara (Himbara). Saldo uang elektronik yang telah masuk dalam KKS dapat digunakan oleh KPM untuk berbelanja kebutuhan pangan seperti beras, telur, sayur-mayur dan bahan pokok lainnya pada pedagang atau agen Elektronik Warung Gotong Royong (E-Warong) yang terintegrasi dengan pihak Bank Himbara. Kemudian, apabila saldo uang elektronik yang dimiliki oleh KPM masih tersisa, maka secara otomatis akan tersimpan dalam akun rekening BPNT dan jumlahnya akan diakumulasikan dengan saldo bantuan pada bulan berikutnya, sehingga bisa digunakan kembali oleh KPM untuk berbelanja kebutuhan pangan dalam jangka waktu 60 hari lamanya. Namun, pada akhir tahun 2022 dalam rangka percepatan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat, selain menggunakan mekanisme elektronik melalui KKS pada agen E-Warong, pencairan BPNT kepada masyarakat juga dilaksanakan secara tunai melalui kantor pos yang dibagikan tiap tiga bulan sekali.

Setelah pertama kali diluncurkan pada tahun 2017, Program BPNT secara bertahap telah diimplementasikan di berbagai daerah. Salah satu provinsi yang telah menjalankan Program BPNT ini adalah Provinsi Lampung. Namun pelaksanaan Program BPNT dalam penanggulangan kemiskinan masyarakat di Provinsi Lampung dikatakan belum maksimal, hal ini terlihat dari persentase kemiskinan penduduk di Provinsi Lampung yang masih cukup tinggi pada periode tahun 2019-2021 :

**Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Lampung
Periode Tahun 2019-2021**

Wilayah	Persentase Penduduk Miskin		
	2019	2020	2021
Lampung Barat	12,92 %	12,52 %	12,82 %
Tanggamus	12,05 %	11,68 %	11,81 %
Lampung Selatan	14,31 %	14,08 %	14,19%
Lampung Timur	15,24 %	14,62 %	15,08 %
Lampung Tengah	12,03 %	11,82 %	11,99 %
Lampung Utara	19,90 %	19,30 %	19,63 %
Way Kanan	13,07 %	12,90 %	13,09 %
Tulang Bawang	9,35 %	9,33 %	9,67 %
Pesawaran	15,19 %	14,76 %	15,11 %
Pringsewu	10,15 %	9,97 %	10,11 %
Mesuji	7,47 %	7,33 %	7,54 %
Tulang Bawang Barat	7,75 %	7,39 %	8,32 %
Pesisir Barat	14,48 %	14,29 %	14,81 %
Bandar Lampung	8,71 %	8,81 %	9,11 %
Metro	8,68 %	8,47 %	8,93 %

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung

Terlihat pada tabel di atas, menunjukkan bahwa persentase kemiskinan penduduk di Provinsi Lampung cenderung tidak stabil selama tiga tahun terakhir. Pada rentang tahun 2019-2020 rata-rata persentase penduduk miskin Provinsi Lampung mengalami penurunan. Akan tetapi, pada periode tahun 2020-2021 secara umum persentase kemiskinan penduduk Provinsi Lampung naik secara signifikan sebagai akibat dari melandanya pandemi covid-19. Meningkatnya jumlah penduduk miskin ini tentunya menjadi tantangan bagi pemerintah daerah, terlebih lagi mengingat bahwa persentase kemiskinan penduduk di Provinsi Lampung mencapai 11, 67 %, masih lebih tinggi dibandingkan persentase kemiskinan penduduk secara nasional yang berada pada angka 9,54 %.

Berdasarkan angka persentase tersebut mengindikasikan bahwa kemiskinan sebagai suatu permasalahan serius yang harus segera diatasi.

Lampung Tengah merupakan salah satu daerah administratif tingkat kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Kabupaten Lampung Tengah juga turut melaksanakan Program BPNT bersama Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah, dalam rangka mengurangi angka kemiskinan masyarakat di wilayahnya sejak tahun 2018 lalu. Pengimplementasian program BPNT di Kabupaten Lampung Tengah dilaksanakan karena masih banyaknya jumlah masyarakat yang hidup pada kondisi prasejahtera.

Tabel 2. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018-2021

Tahun	Penduduk Miskin Kabupaten Lampung Tengah	
	Jumlah	Persen (%)
2018	160.120	12,62
2019	153.840	12,03
2020	152.276	11,82
2021	155.770	11.99

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Tengah, 2022

Data pada tabel 2 menunjukkan bahwa tingkat penduduk miskin di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2018-2021 terbilang cukup tinggi. Jumlah penduduk miskin pada rentang tahun 2018-2019 hanya turun sebesar 0,59 %. Selanjutnya pada tahun 2020 kemiskinan penduduk hanya berkurang sebesar 0,21% dari tahun sebelumnya, dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2021 sebesar 0,17 % dengan total penduduk miskin mencapai 155.770 jiwa.

Penyaluran BPNT guna membantu masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan juga dilaksanakan salah satunya di Kecamatan Terbanggi Besar. Akan tetapi, penyaluran Program BPNT di Kecamatan Terbanggi Besar masih belum maksimal dalam rangka mengentaskan kemiskinan masyarakat. Hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat miskin di Kecamatan Terbanggi Besar yang belum memperoleh bantuan ini.

Tabel 3. Daftar Penerima BPNT di Kecamatan Terbanggi Besar Tahun 2022

No	Desa/ Kelurahan	Penduduk yang Berhak Menerima BPNT (DTKS)	Penduduk Miskin yang Menerima BPNT	Penduduk Miskin yang Belum Menerima BPNT
1	Desa Adi Jaya	767	250	517
2	Kelurahan Bandar Jaya Barat	1275	254	1021
3	Kelurahan Bandar Jaya Timur	1546	399	1147
4	Desa Indra Putra Subing	837	195	642
5	Desa Karang Endah	825	171	654
6	Desa Nambah Dadi	993	351	642
7	Desa Onoharjo	552	222	330
8	Desa Poncowati	960	276	684
9	Desa Terbanggi Besar	3476	1130	2346
10	Kelurahan Yukum Jaya	1983	668	1315
Total		13.214	3.916	9.298

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah, 2022

Terlihat pada data di atas diketahui bahwa penyaluran bansos BPNT khususnya di Kecamatan Terbanggi Besar telah dilakukan di 7 desa dan 3 kelurahan. Berdasarkan data yang tercatat pada sistem DTKS menunjukkan bahwa di Kecamatan Terbanggi Besar pada tahun 2022, jumlah keluarga miskin yang berhak untuk memperoleh bansos BPNT yaitu sebanyak 13.214. Namun, keluarga miskin yang terdata sebagai KPM BPNT baru sekitar 3.916. Ini berarti

masih terdapat sekitar 9.298 keluarga miskin di Kecamatan Terbanggi Besar yang belum merasakan manfaat dari adanya program BPNT dalam meringankan beban masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan pangan. Masih banyaknya keluarga miskin yang belum mendapatkan bansos BPNT menunjukkan adanya masalah di mana bansos BPNT belum dapat tersalurkan kepada seluruh masyarakat miskin yang seharusnya berhak untuk mendapatkan bansos tersebut.

Berdasarkan hasil pra-riset yang penulis lakukan masalah lainnya yang terjadi dalam pelaksanaan Program BPNT di Kecamatan Terbanggi Besar yaitu hambatan saat pencairan BPNT yang disebabkan karena Kartu Keluarga Sejahtera milik KPM tidak memiliki saldo (saldo kosong). Akibat saldo kosong pada KKS ini membuat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak dapat melakukan belanja pada agen E-Warong guna memperoleh bantuan pangan. Hal tersebut tentunya menjadi penghambat dalam pencapaian tujuan awal dari Program BPNT itu sendiri yaitu untuk meringankan beban masyarakat kurang mampu dalam pemenuhan kebutuhan pokok pangan mereka. Selain itu, terdapat hambatan lain yang dihadapi seperti KKS milik KPM ada yang mengalami kerusakan dan juga hilang.

Berikut merupakan jumlah KPM BPNT yang tidak bertransaksi disebabkan karena KKS Saldo kosong pada periode Agustus 2022 :

Tabel 4. Jumlah KKS Saldo Kosong Pada Penyaluran BPNT Periode Agustus Tahun 2022

No	Desa/ Kelurahan	Jumlah KKS Saldo Kosong Bulan Agustus 2022
1	Desa Adi Jaya	19
2	Kelurahan Bandar Jaya Barat	63

No	Desa/ Kelurahan	Jumlah KKS Saldo Kosong Bulan Agustus 2022
3	Kelurahan Bandar Jaya Timur	16
4	Desa Indra Putra Subing	15
5	Desa Karang Endah	26
6	Desa Nambah Dadi	14
7	Desa Onoharjo	2
8	Desa Poncowati	66
9	Desa Terbanggi Besar	9
10	Kelurahan Yukum Jaya	0
Total		230

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah, 2022

Berdasarkan data di tabel 5 diketahui pada penyaluran BPNT periode Agustus 2022 terdapat sebanyak 230 Kartu Keluarga Sejahtera yang tidak memiliki saldo uang elektronik (saldo kosong). Permasalahan saldo kosong ini paling banyak terjadi di Desa Poncowati dengan jumlah KKS kosong sebanyak 66. Sedangkan yang terendah berada di Kelurahan Yukum Jaya di mana tidak ditemui KKS dengan saldo kosong.

Permasalahan berikutnya yang ditemukan yaitu adanya kendala pada mesin *Electronic Data Capture* pada E-Warong yang sering mengalami eror karena gangguan jaringan internet sehingga menghambat transaksi belanja pangan oleh KPM BPNT di Kecamatan Terbanggi Besar. Seperti yang diketahui bahwa penyaluran BPNT kepada KPM menggunakan mekanisme elektronik di mana transaksi dalam pembelian kebutuhan pangan oleh KPM BPNT pada agen-E Warong tidak dilakukan secara tunai, melainkan menggunakan *e-money* yang terdapat pada Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Untuk berbelanja kebutuhan

pangan pada agen e-warong KPM harus membawa KKS sebagai alat transaksi yang kemudian akan digesek pada mesin EDC yang telah terintegrasi dengan pihak bank penyalur.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diidentifikasi beberapa masalah dalam pelaksanaan Program BPNT di Kecamatan Terbanggi Besar antara lain :

1. Masih banyaknya masyarakat yang tergolong sebagai keluarga miskin pada sistem DTKS di Kecamatan Terbanggi Besar yang belum menerima Bantuan Pangan Non Tunai. Pada Kecamatan Terbanggi Besar ada sekitar 13.214 keluarga miskin yang seharusnya berhak menerima BPNT. Akan tetapi, yang terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat BPNT hanya sebanyak 3.916. Hal ini menunjukkan bahwa penyaluran BPNT kepada keluarga miskin di Kecamatan Terbanggi Besar belum optimal.
2. Adanya kendala saldo kosong pada KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) yang menyebabkan KPM tidak bisa melakukan transaksi belanja pangan pada agen E-Warong. Kemudian adanya KKS yang rusak dan hilang juga menjadi penghambat dalam pelaksanaan BPNT.
3. Masih ditemuinya hambatan pada proses transaksi pembelanjaan pangan yang dilakukan oleh KPM. Kendala transaksi tersebut disebabkan karena mesin EDC (*Electronic Data Capture*) mengalami eror akibat gangguan jaringan internet. Selain itu, mesin EDC juga mengalami eror apabila terlalu banyak melakukan penggesekan untuk bertransaksi.

Dilihat dari ketiga temuan fenomena permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan program BPNT di Kecamatan Terbanggi Besar, diketahui bahwa

penyaluran BPNT kepada masyarakat belum dilakukan secara merata. Maka dari itu diperlukan suatu studi mengenai evaluasi untuk mengetahui keberhasilan (kinerja) program dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan setelah suatu kebijakan atau program diterapkan dalam jangka waktu tertentu untuk menilai pencapaian program (Subarsono, 2020). Evaluasi dilakukan dengan tujuan memberikan penilaian terkait apakah program yang dijalankan sudah terlaksana sesuai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan adanya hasil evaluasi kemudian dapat menjadi masukan agar suatu program dapat menghasilkan pencapaian lebih baik lagi ke depannya. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Kurniawan et. Al (2021) menyebutkan bahwa program yang telah diimplementasikan perlu dievaluasi agar diketahui apakah program telah sesuai dengan sasaran yang ditargetkan. Maka dari itu, akan dilakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Berbasis Elektronik Dalam Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Di Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang dijelaskan pada latar belakang, masalah yang dirumuskan adalah “Bagaimana Keberhasilan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Berbasis Elektronik Dalam Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat di Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah?”

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan keberhasilan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Berbasis Elektronik

Dalam Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Di Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dihasilkan dari adanya penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan mahasiswa serta bermanfaat untuk pengembangan disiplin Ilmu Administrasi Publik terutama yang berkaitan dengan topik Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Berbasis Elektronik Dalam Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Di Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan informasi tambahan bagi khalayak umum dan menjadi masukan bagi para *stakeholder* terkait Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Berbasis Elektronik Dalam Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat di Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, A. Y., & Rusfina, Y. (2016). *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. ALFABETA.
- Agustino, L. (2017). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Akbar, M. F., & Mohi, W. K. (2018). *Studi Evaluasi Kebijakan (Evaluasi Beberapa Kebijakan di Indonesia)*. Ideas Publishing.
- Alisjahbana, Armida Salsiah, E. M. (2018). *TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA: Konsep, Target, dan Strategi Implementasi*. Unpad Press.
- Ananda, R., & Rafida, T. (2017). Pengantar Evaluasi Program Pendidikan. In *Perdana Publishing* (Vol. 53, Issue 9). Perdana Publishing.
- Anggara, S. (2018). *Kebijakan Publik*. CV. Pustaka Setia.
- Arianto, D., M. Wantu, S., & Aneta, Y. (2021). Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(11), 1847–1855. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i11.470>
- Arikunto, S., & Jabar, C. S. A. (2018). *Evaluasi Program Pendidikan*. PT Bumi Aksara.
- Banjarnahor, G., Akhyary, E., & Hendrayady, A. (2021). Evaluasi Program Pengelolaan E-Warong di Dinas Sosial Kota Tanjungpinang (Studi Pada E-Warong Tuah Sakti Kelurahan Tanjungpinang Timur). *Student Online Journal (SOJ) UMRAH*, 2(1), 306–315. <https://soj.umrah.ac.id/index.php/SOJFISIP/article/view/853>
- Bhinadi, A. (2017). *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Deepublish.
- Bororing, T., Kimbal, A., & Kumayas, N. (2022). Pengawasan Dinas Sosial Dalam Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Modoining. *Jurnal Governance*, 2(2), 1–12.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (p. 710). Gajah Mada University.
- Engkus, E. (2020). Komunikasi Kebijakan Bantuan Pangan Nontunai Melalui E-Warong. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 23(1), 47–60. <https://doi.org/10.20422/jpk.v23i1.677>
- Fatimah, M., Hasanah, B., & Sururi, A. (2022). Dynamic Governance Dalam Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Bagi Keluarga Penerima Manfaat. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 3(1), 79. <https://doi.org/10.29103/jspm.v3i1.4939>
- Imelda, M., & Sufiawan, N. A. (2022). Analisis Dampak Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Pemenuhan Kebutuhan Pangan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kota Payakumbuh Pada Masa Covid-19. *Jurnal Ekonomi Dan*

Kebijakan Publik, 5(1).

- Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik*. UNG Press.
- Kawung, A. M., Lumolos, J., & Sampe, S. (2020). Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Kepada Keluarga Penerima Manfaat Di Kelurahan Mahakeret Barat Dan Kelurahan Mahakeret Timur Kecamatan Wenang Kota Manado. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 4(4), 1–9.
- Khomaini, A. A. (2020). Dampak Program Bantuan Tunai (Cash Transfer) Terhadap Kesejahteraan Subjektif di Indonesia. *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan, Dan Kebijakan Publik*, 5(1), 1–16.
- Kompas.com. (2022). *Pemerintah Targetkan Kemiskinan Nol Persen Pada 2024*.
- Krisnamurti, B., Ananda, N., & Nugroho, A. (2010). *Ketahanan Pangan Kunci Bagi Pengurangan Penduduk Miskin*. <https://www.umy.ac.id/ketahanan-pangan-kunci-bagi-pengurangan-penduduk-miskin>
- Kurniawan, A., Hakim, L., & Ramdani, R. (2021). Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Karawang Barat. *Gorontalo Journal of Government and Political Studies*, 4(1), 040. <https://doi.org/10.32662/gjgops.v4i1.1233>
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mustari, N. (2015). *Pemahaman Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik)*. PT Leutika Nouvalitera.
- Noviyanti, R., Syaefuddin, Yuliani, L., & Herwina, W. (2019). Partisipasi Kelompok Wanita Tani dalam Meningkatkan Program P2WKSS untuk Memanfaatkan Lahan. *Jurnal Cendekiawan Ilmiah PLS*, 4(2), 59–70.
- Ruhyana, Nugrahana Fitri, F. H. (2020). STRATEGI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG DALAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL DI MASA PANDEMI COVID-19. *Khazanah Intelektual*, 4(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.37250/newkiki.v4i1.69>
- Rustanto, B. (2015). *Menangani Kemiskinan*. PT Remaja Rosdakarya.
- Sabariman, M., & Suradi. (2022). Tata Kelola Program Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Program BPNT di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan). *Share : Social Work Journal*, 12(1), 66. <https://doi.org/10.24198/share.v12i1.38948>
- Subarsono, A. (2020). *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. ALFABETA.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Administrasi*. CV ALFABETA.
- Supiani, B. S., & Suryani, L. (2020). Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Pada E-Warong Di Desa Harus Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong. *Japb*, 3(1984), 672–685.

- Tiara, R., & Mardianto. (2019). Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Palembang. *Demography Journal of Sriwijaya (DeJos)*, 3(1), 36–44. <http://ejournal-pps.unsri.ac.id/index.php/dejos/article/view/55%3E>
- TNP2K. (2017). *Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai*. Kementerian Sosial.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik : Teori, Proses dan Studi Kasus*. CAPS.